

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Perilaku**

Perilaku adalah tanggapan terhadap stimulus dari lingkungan yang memengaruhi individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu terlibat dalam interaksi dengan sesama dan lingkungannya. Berbagai stimulus yang berasal dari sekitar kita memicu reaksi dari individu. Dalam perspektif psikologi, perilaku diartikan sebagai langkah yang diambil manusia untuk memenuhi kebutuhannya (Asri & Suharni, 2021).

Bohar Soeharto menyatakan bahwa perilaku muncul sebagai konsekuensi dari proses pembelajaran yang timbul melalui interaksi individu dengan lingkungannya, yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pribadi (Tu'u, 2004).

Saifudin Anwar menjelaskan bahwa perilaku dapat bersifat sederhana atau kompleks, merupakan ekspresi sikap seseorang. Sikap tersebut telah terbentuk sebagai respon terhadap tekanan atau hambatan, baik dari lingkungan eksternal maupun internal. Ini berarti bahwa potensi reaksi yang sudah ada dalam dirinya akan muncul sebagai perilaku aktual, mencerminkan sikapnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada disekitarnya. Perilaku mencakup segala kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun oleh pihak luar (Suharyat, 2009).

Skinner (1983), seorang pakar psikologi menyatakan bahwa perilaku merujuk pada tanggapan atau respons individu terhadap stimulus, yang merupakan rangsangan dari luar. Teori ini dikenal sebagai istilah S-O-R (Stimulus-Organisme-Respon). Menurut teori S-O-R ini, perilaku manusia dapat dibagi menjadi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Perilaku Tertutup (*Covert Behaviour*)

Perilaku tertutup terjadi ketika respons terhadap stimulus tidak dapat diamati oleh orang lain dari luar. Respons individu masih terkait dengan aspek-aspek seperti perhatian, perasaan, pengetahuan, dan sikap terhadap stimulus. Bentuk perilaku tertutup yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikap.

2. Perilaku Terbuka (*Overt Behaviour*)

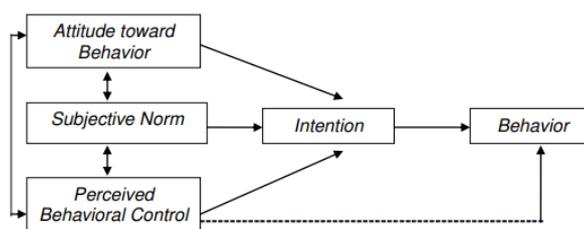
Perilaku terbuka terjadi ketika respons terhadap stimulus sudah berwujud tindakan atau praktek yang dapat diamati oleh orang lain dari luar (Mahyarni, 2013).

Menurut pandangan Kurt Lewin (1951), perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai hasil dari karakteristik individu seperti motif, nilai-nilai, dan sifat kepribadian, yang saling berinteraksi dengan lingkungan. Faktor lingkungan, menurut Lewin memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku, bahkan terkadang kekuatannya dapat melampaui karakteristik individu, menjadikan prediksi perilaku menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari keseimbangan antara kekuatan-kekuatan pendorong dari karakteristik individu dan kekuatan-kekuatan penahan dari lingkungan (Suharyat, 2009).

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku melibatkan aspek-aspek seperti pendidikan, nilai-nilai budaya, situasi politik, dan sebagainya. Di sisi lain, faktor hereditas mencakup warisan bawaan yang diberikan oleh pencipta alam semesta, yang termanifestasi dalam diri manusia sejak lahir dan sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Secara bersama-sama, kedua faktor ini turut berperan dalam membentuk perilaku manusia. Perilaku mencerminkan diri secara konkret melalui sikap, tindakan, dan ucapan yang muncul sebagai hasil dari proses pembelajaran, rangsangan dan interaksi dengan lingkungan (Tu'u, 2004).

Dalam *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) yang dikemukakan oleh Izek Ajzen (1991), dikatakan bahwa intensi (niat) berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yaitu:

**Gambar 2.1 Teori Perilaku Direncanakan (*Theory Of Planned Behavior*)**



**Sumber: Ajzen (1991)**

### 1. Sikap (*Attitude*)

Sikap merujuk pada evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku yang dimaksud. Pandangan terhadap suatu tindakan dipengaruhi oleh keyakinan

individu mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut, yang juga disebut sebagai *behavioral beliefs*. Keyakinan ini terkait dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya dan pemahaman mereka tentang diri sendiri dan lingkungannya. Dalam konteks teori perilaku yang direncanakan, Ajzen menekankan bahwa cara untuk mengidentifikasi keyakinan adalah dengan mengaitkan suatu perilaku yang akan diprediksi dengan manfaat atau kerugian yang mungkingtimbul apabila individu tersebut melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Keyakinan ini memiliki potensi untuk memperkuat sikap terhadap perilaku, berdasarkan evaluasi data yang menunjukkan bahwa perilaku tersebut dapat memberikan keuntungan bagi individu yang melakukan tindakan tersebut.

## 2. Norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Norma subjektif mencakup perasaan atau perkiraan individu tentang harapan-harapan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya terkait pelaksanaan atau penolakan suatu perilaku tertentu. Karena sifatnya yang subjektif, dimensi ini disebut sebagai norma subjektif (*subjective norm*). Adanya hubungan yang kuat antara sikap terhadap perilaku dan norma subjektif membuatnya dipengaruhi oleh keyakinan. Namun, perbedaannya terletak pada fungsinya, jika hubungan antara sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan terhadap perilaku yang dilakukakan (*behavioral belief*), maka norma subjektif dipandang sebagai fungsi dari keyakinan individu yang diperoleh melalui pandangan orang lain yang memiliki hubungan dengan mereka (*normative beliefs*). Pada intinya norma subjektif ini mencerminkan persepsi individu tentang ekspektasi orang-orang yang

penting baginya, seperti keluarga, teman, atau atasan, terhadap perilaku yang dimaksud. Ini mencakup faktor-faktor sosial yang mempengaruhi niat individu.

### 3. Kontrol Perilaku yang Dirasakan (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi kontrol perilaku, atau yang sering disebut sebagai kontrol perilaku, adalah pandangan individu terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan perilaku tersebut. Ini melibatkan faktor-faktor yang berada di luar kendali individu seperti, keterampilan, sumber daya atau kendala lingkungan (Mahyarni, 2013).

#### 2.1.1. *Green Behaviour*

Golman & Barlow (2012) menjelaskan bahwa “*green behaviour* adalah perilaku manusia dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup yang berada di lingkungan terdekatnya” (Wandari & Darma, 2020). *Green behaviour* muncul dikarenakan adanya kesadaran manusia untuk mencintai alam semesta. *Green behaviour* seharusnya menjadi tindakan yang didasari oleh nilai, norma dan kepedulian terhadap alam semesta. Tindakan-tindakan *green behaviour* dapat terlihat dalam aktivitas sehari-hari individu, seperti menjaga kebersihan lingkungan rumah, membuang sampah pada tempatnya, mengonsumsi makanan sehat, mendaur ulang sampah rumah tangga, serta menggunakan listrik dan air secara bijak. Fokus dari *green behaviour* adalah norma moral manusia yang mencerminkan sikap cinta terhadap alam semesta. (Putri & Nikawanti, 2017).

Sesuai dengan konsep *green behaviour* yang didefinisikan oleh Capra (2010), *green behaviour* manusia dapat dianggap sebagai etika individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Inti dari *green behaviour* adalah norma

moral manusia yang mendasari tindakan kasih sayang terhadap alam semesta (Sekaringtyas, 2020).

*Green behaviour* juga dapat dikenal sebagai perilaku pro lingkungan yang berupaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Perilaku ini juga merupakan tindakan yang secara luas diakui dalam masyarakat sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan berkomitmen pada keberlangsungan lingkungan yang sehat (Krajhanzl, 2010). Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang saling terikat dan timbal balik. Lingkungan mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Interaksi yang berlangsung secara terus menerus antara manusia dan lingkungan akan memengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungan. Sikap dan perilaku manusia akan menjadi penentu kondisi lingkungan, baik itu positif maupun negatif. Perlakuan manusia terhadap lingkungannya akan memengaruhi kualitas hidup manusia itu sendiri (Hamzah, 2017). Para ahli menggunakan beberapa istilah untuk menyatakan perilaku yang bersifat melindungi lingkungan, antara lain perilaku peduli terhadap lingkungan, perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan perilaku yang mendukung lingkungan (Lee, Jan, & Yang, 2013). Terdapat enam aspek yang dapat digunakan sebagai indikator perilaku pro lingkungan, yaitu efisiensi energi, mobilitas dan transportasi, pengurangan limbah, prinsip daur ulang, pola konsumsi dan upaya pelestarian lingkungan. Aspek-aspek ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana individu mengadopsi perilaku pro lingkungan. (Kaiser, Oerke, & Bogner, 2017).

Menurut (Kollmuss & Agyeman, 2002), perilaku pro lingkungan adalah perilaku yang timbul dari kesadaran seseorang untuk mengurangi dampak

negatif dari aktivitasnya terhadap lingkungan dan pembangunan, termasuk upaya seperti mengurangi penggunaan sumber daya, menghemat energi, menggunakan bahan yang tidak beracun dan mengurangi produksi sampah. Ramus dan Killmer dalam (Sawitri, Hadiyanto, & Hadi, 2015) menyatakan bahwa perilaku pro lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk perilaku pro sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok atau organisasi dengan fokus pada perlindungan lingkungan.

Menurut (Schultz, 2000) perilaku pro lingkungan dapat dipahami sebagai upaya individu untuk mencegah dan melindungi lingkungan, termasuk menjaga kelestarian alam serta menangani berbagai isu lingkungan. Perilaku pro lingkungan juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang secara spesifik memperhatikan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari, seperti mengurangi konsumsi energi (minyak, gas, listrik), menjaga sumber daya alam (udara, tanah, air), melakukan daur ulang (kertas, plastik), serta menjaga keberlangsungan kehidupan flora dan fauna.

Menurut (Noblet & McCoy, 2017) dan (Werfel, 2017) individu yang mengadopsi perilaku pro lingkungan cenderung percaya bahwa tindakan yang mereka lakukan sudah mencukupi untuk menjaga lingkungan. Akibatnya sebagian dari mereka mungkin kurang memandang pentingnya kebijakan lingkungan diusulkan oleh pemerintah atau organisasi lainnya. Sebaliknya, beberapa peneliti lain seperti (Thøgersen & Crompton, 2009), (Werff, Steg, & Keizer, 2013) berargumen bahwa individu yang menunjukkan perilaku pro lingkungan cenderung mengidentifikasi diri mereka sebagai individu yang peduli terhadap lingkungan.

Hal ini pada akhirnya dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk mendukung kebijakan lingkungan yang telah ada.

(Stern, 2000) mengelompokkan perilaku pro lingkungan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Dalam ranah pribadi, individu melakukan tindakan-tindakan seperti daur ulang sampah. Daur ulang sampah dapat berupa pilah sampah, penggunaan kembali kertas atau gelas sisa pembelian, pengurangan penggunaan AC, rutin mematikan lampu, penghematan air, penggunaan transportasi umum, dan membeli barang yang ramah lingkungan.
2. Dalam ranah publik, perilaku ramah lingkungan mencakup partisipasi dalam petisi terkait isu lingkungan dan mendukung kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah.
3. Aksi lingkungan melibatkan partisipasi dalam gerakan massa untuk menolak kerusakan lingkungan, seperti bergabung dengan kelompok advokasi lingkungan dan mengambil bagian dalam protes atau demonstrasi menentang aktivitas yang merusak lingkungan.

Perilaku pro lingkungan juga dapat termanifestasi melalui tindakan individu dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi. Tindakan seseorang dalam hal ini kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh organisasi tempat mereka bekerja, seperti contohnya seorang teknisi di perusahaan otomotif yang terlibat dalam pengembangan desain mobil listrik yang ramah lingkungan.

Aspek menarik dari *green behaviour* dalam kaitannya dengan interaksi manusia dan lingkungan sekitarnya melibatkan identitas tempat dan

kesadaran lingkungan. Identitas tempat menjadi bagian pokok dari pengetahuan seseorang tentang lingkungan fisik tempat tinggalnya, yang terkait dengan tempat yang memiliki makna emosional dan signifikan dalam kehidupannya. *Green behaviour* diharapkan menjadi gaya hidup yang dianut oleh semua individu di era ke-21. Sebagai gaya hidup, *green behaviour* diharapkan mampu menciptakan keseimbangan ekosistem, memungkinkan alam dan semua makhluk hidup di dalamnya untuk hidup secara berkelanjutan. Tentu saja, hal ini tidak dapat terwujud tanpa adanya upaya nyata (Sekaringtyas, 2020).

## **2.2. Kebijakan**

### 1) Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, tindakan, dan sikap yang diimplementasikan oleh berbagai pihak atau aktor sebagai langkah dalam menangani masalah yang dihadapi. Pembuatan kebijakan menjadi faktor yang sangat penting bagi suatu organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Iskandar, 2012).

Thoha (2012) menyatakan bahwa kebijakan mempunyai 2 aspek, yaitu:

1. Kebijakan adalah sebuah praktika sosial yang tidak dapat dianggap sebagai suatu peristiwa tunggal atau terisolir. Oleh karena itu, kebijakan adalah hasil dari proses perumusan pemerintah yang berakar pada berbagai kejadian dalam masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut tumbuh dalam praktik kehidupan sosial dan tidak dapat dianggap sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

2. Kebijakan merupakan tanggapan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik dengan tujuan untuk mencapai keselarasan diantara pihak-pihak yang sedang berkonflik, maupun untuk memberikan insentif terhadap tindakan bersama dari para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Dengan demikian, kebijakan dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil guna mencapai tujuan tertentu, sekaligus berperan sebagai strategi penyelesaian masalah yang mengaplikasikan metode dan dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. Kebijakan umumnya memiliki sifat fundamental, karena pada dasarnya hanya memberikan pedoman umum sebagai landasan untuk mengambil tindakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Chandler dan Plano (1988) mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah” (Kadji, 2015). Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan telah menjadi alat yang berharga bagi para pelaksana di berbagai tingkat birokrasi pemerintahan dan bagi para politisi dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang secara berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat, dengan tujuan memungkinkan mereka hidup dan berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan dan kehidupan sosial (Kadji, 2015).

(Dye, 2014) menyatakan bahwa: *“Public Policy is whatever governments choose to do or not to do”* atau mencakup segala keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas berbagai tugas, termasuk penanganan konflik dalam masyarakat, pengorganisasian masyarakat untuk berinteraksi dengan kelompok lain, pemberian imbalan simbolis dan layanan material kepada warganya, serta pengumpulan dana dari masyarakat, terutama melalui sistem perpajakan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat mencakup pengaturan perilaku, manajemen birokrasi, distribusi manfaat, dan pengenaan pajak atau bahkan melibatkan semua hal tersebut sekaligus. Sejalan dengan Dye, Edwards III dan Sharkansy menyatakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan”. Dengan demikian, kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan berbagai program pemerintah, baik yang diimplementasikan maupun yang tidak diimplementasikan (Kadji, 2015).

Dari beberapa definisi diatas, secara kebijakan publik dianggap sebagai rangkaian tindakan, keputusan, dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah dengan tujuan mencapai suatu target tertentu. Definisi-definisi tersebut menekankan pada peran pemerintah dalam merumuskan, menerapkan, dan mengelola kebijakan untuk memengaruhi perilaku masyarakat dan mencapai hasil tertentu sesuai dengan kepentingan publik.

## 2) Persepsi Kebijakan

Definisi persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyiratkan respon atau penerimaan langsung terhadap sesuatu, dan juga merujuk

pada proses di mana individu memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal melalui panca inderanya. Dalam konteks psikologi, persepsi dijelaskan sebagai proses dimana individu menyadari segala aspek dalam lingkungannya melalui inderanya atau melalui interpretasi data inderanya untuk memperoleh pengetahuan tentang lingkungannya (Rahayu & Wibowo, 2018). Persepsi masyarakat merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan, sikap, dan penilaian masyarakat dalam memberikan respon terhadap hal-hal atau objek tertentu yang diperoleh melalui panca indera mereka. Proses membentuk gambaran tentang objek atau subjek yang sedang diwujudkan dalam persepsi mereka (Intami, 2021). Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bogor.

George C. Edward III (1980) menyebutkan bahwa terdapat 4 variabel atau komponen yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yakni:

1. Komunikasi

Keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang efektif dapat terjadi ketika para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, di mana informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan dapat disampaikan dengan efisien. Menurut George C. Edward III terdapat tiga komponen komunikasi yang

memengaruhi sebuah kebijakan yaitu sosialisasi (transmisi), kejelasan dan konsistensi.

## 2. Sumber daya

Keberadaan sumber daya menjadi kebutuhan mutlak agar tujuan kebijakan pemerintah dapat terealisasikan. Kualitas dari sumber daya tersebut akan menentukan sejauh mana tujuan tersebut dapat terwujud. Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap kebijakan.

## 3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, kecenderungan keinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk menjalankan sebuah kebijakan. Jika implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu. Selain itu mereka juga perlu memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi ini merupakan karakteristik yang melekat pada para pelaksanan kebijakan, yang mencakup karakteristik seperti kejujuran, komitmen, demokratis, kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Tingkat disposisi yang tinggi berdampak positif pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

#### 4. Struktur birokrasi

George Edward III (1980) menyatakan bahwa struktur birokrasi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam birokrasi terdapat dua karakteristik utama, yaitu *Standard Operational Procedure (SOP)* dan Fragmentasi (Vikalista, 2018).

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting karena akan menjadi acuan bagi peneliti untuk memperkaya teori dan pengetahuan, menjadi bahan evaluasi agar menciptakan penelitian baru yang lebih *up to date* dan akurat. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mayank Intami tahun 2021 dengan judul “*Hubungan Antara Kebijakan Kantong Plastik Sekali Pakai Dengan Kepatuhan Masyarakat Dalam Menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan kebijakan kantong plastik sekali pakai dengan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kebijakan kantong plastik sekali pakai dengan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Persamaan dengan karya ilmiah peneliti terletak pada topik, serta tentang perilaku masyarakat dalam usaha mengurangi penggunaan kantong plastik. Adapun perbedaan dengan karya ilmiah peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitian dan variabel penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Sri Wulandari, Maya Rezeki Angriani dan Dewi Aina tahun 2022 dengan judul “*Pengaruh Peraturan Daerah Tentang Larangan Penggunaan Kantong Plastik pada Perusahaan Retail di Kota Banjarmasin*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh peraturan daerah mengenai larangan penggunaan kantong plastik pada perusahaan retail di kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin (X) berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Kantong Plastik (Y). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016 mengenai Pengurangan penggunaan kantong plastik telah dijalankan dengan baik, melalui penyuluhan ataupun sosialisasi kepada seluruh stakeholder, khususnya pada toko modern/retail sudah diterapkan dengan baik dan dapat diterima oleh konsumen. Persamaan dengan karya ilmiah peneliti terletak pada topik penelitian. Adapun perbedaan dengan karya ilmiah peneliti yaitu terletak pada variabel dan lokasi penelitiannya.
3. Penelitian yang ditulis oleh Ayu Novianti tahun 2017 dengan judul “*Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor*”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengidentifikasi respon konsumen di Kota Bogor terhadap penggunaan kantong belanja sendiri berdasarkan karakteristik sosio-demografis, mengidentifikasi persepsi konsumen di Kota Bogor mengenai *green marketing* kebijakan kantong plastik berbayar terhadap *green behaviour*, serta menganalisis pengaruh *green marketing* terhadap *green behaviour*. Hasil

penelitian menunjukkan setelah kebijakan diterapkan, lebih banyak konsumen yang bersedia mengurangi penggunaan kantong plastik dan membawa kantong belanja sendiri. Persamaan dengan karya ilmiah peneliti terletak pada variabel dependen dan lokasi penelitian. Adapun perbedaan dengan karya ilmiah peneliti adalah terletak pada variabel independen, fokus penelitian, teori dan dasar kebijakan yang digunakan

#### **2.4. Kerangka Pemikiran**

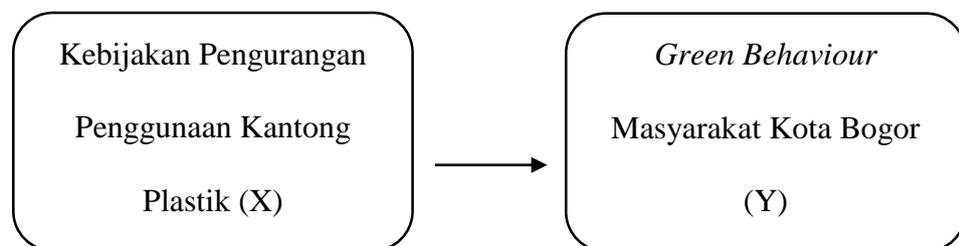
Permasalahan sampah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampah yang paling banyak ialah sampah plastik yang sulit sekali mengalami penguraian. Terjadinya penumpukan sampah tersebut disebabkan karena hasil dari sisa pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengambil langkah guna menekan jumlah sampah plastik dengan menerbitkan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kebijakan tersebut diterapkan pada industri retail modern, baik itu minimarket ataupun supermarket. Penelitian ini menguji sejauh mana pengaruh dari Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap *Green Behaviour* masyarakat Kota Bogor.

Dengan produksi sekitar 600 ton sampah per hari di Kota Bogor dan 13% diantaranya adalah sampah plastik, diharapkan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari kota, khususnya kantong plastik. Selain itu, diharapkan kebijakan ini dapat mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai investasi untuk masa depan. Dilihat dari Undang-

Undang No. 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, dalam menangani permasalahan sampah yang sulit terurai, terutama sampah yang berbahan dasar plastik, dijelaskan bahwa bukan hanya masyarakat saja yang memiliki peran penting, namun pemerintah daerah serta produsen juga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan bahan yang dipakai dalam sebuah produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan ini semua lapisan mempunyai peran serta tanggung jawabnya tersendiri dalam hal pengelolaan sampah.

Dengan adanya regulasi terkait perilaku masyarakat terhadap lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Sehingga, diharapkan masyarakat akan termotivasi untuk mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Melalui langkah ini, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat bekerja bersama-sama dalam upaya penyelamatan lingkungan dan ekosistem alam demi kesejahteraan semua makhluk hidup di bumi.

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**



Keterangan → artinya Pengaruh

## 2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, maka peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap *green behavior* masyarakat Kota Bogor

Ha: Terdapat pengaruh antara kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap *green behaviour* masyarakat Kota Bogor.